

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)
CABANG PALEMBANG**



Oleh:

DESMITA TRIPOLINA

NIM: 12190050

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam
(S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.*

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

*Wahai diri ini, janganlah engkau menunda sesuatu yang mesti dan harus dilakukan sekarang, karena
jika engkau menundanya maka akan sulit untuk kembali lagi...*

-(Dee18)-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ *Ayahanda tercinta Nangyu dan Ibunda tercinta Holipah
yang senantiasa mendoakan setiap langkahku dan selalu
memberikan dukungan baik moril maupun materil.*
- ❖ *Saudara-saudaraku tersayang Ayuk Deka, Kak Hadi, Adik
Jamil, dan ayuk iparku yuk Yanti yang selalu memberikan
dukungan dan motivasi dalam setiap langkahku*
- ❖ *Teman-teman saya D5EF2, keluarga besar EKI 2, seluruh
angkatan 2012, teman KKN, teman seperjuangan selama
siding yang selalu bersama saat keadaan sulit dalam proses
mengerjakan skripsi.*
- ❖ *Para Pendidik saya yang memberikan banyak ilmu dan
pengetahuan*
- ❖ *Almamater saya sebagai pemberi inspirasi dan tempat untuk
menempa pengalaman hidup*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang populasi penelitian ini adalah seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *total sampling*. Sampel terdiri dari 30 orang responden, yang akan memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan persentase.

Berdasarkan hasil perhitungan dari keseluruhan penerapan masing – masing prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*) yang telah dihitung dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BSM Cab Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dapat dikategorikan sangat baik, karena berada pada skala interval 81%-100%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang secara keseluruhan telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sangat baik. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji struktur *Good Corporate Governance* dengan menggunakan pengumpulan data secara metode wawancara .

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*)

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *alhamdulillah*, serta limpahan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunianya berupa nikmat kesehatan, juga segala kemudahan yang telah diberikan kepada penulis. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungna kita Nabi Muhammad SAW. atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “***Analisis Penerapan prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang***”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, atau mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Amin.

Selanjutnya dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodariah Barkah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ibu Dr. Maftukhatusolikhhah, M.Ag selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Titin Hartini, SE., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Titin Hartini, SE., M.Si selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Deky Anwar, SE., M.Si. selaku Pembimbing utama dan Bapak Muhammadinah, SE., M.Si. selaku Pembimbing kedua, yang banyak meluangkan waktu, memberikan konstribusi tenaga dan fikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Segenap Dosen, Staf Administrasi dan Pengurus Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama ini.
8. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Nangyu dan Ibunda Holipah, yang telah memberikan dukungan baik itu moril maupun materil dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa terbaik.
9. Saudara-saudaraku tersayang, Ayukku Deka, Kakku Hadi, Adikku Jamil yang telah memberikan doa dan motivasi agar penulis selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga.
10. Kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

11. Sahabat-sahabatku D5EF2, keluarga besar Ekonomi Islam 2 Angkatan 2012, teman seperjuangan KKN, Komprehensif, Munaqosyah yang telah membantu serta memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis.
12. Serta seluruh teman seperjuangan Angkatan 2012 khususnya mahasiswa Ekonomi Islam.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Atas semua bantuannya, mudah-mudahan itu semua bisa menjadi amal jariyah di sisi Allah SWT. Penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan ini, kepada Allah penulis mohon ampun. Dengan harapan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Palembang, Februari 2017

Penulis,

Desmita Tripolina

12190050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kontribusi Penelitian	7
F. Orisinalitas Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	11
1. <i>Good Corporate Governace</i>	11
a. Pengertian <i>Good Corporate Governace</i>	11
b. Prinsip <i>Good Corporate Governace</i>	14
a) Keterbukaan (<i>transparency</i>).....	16
b) Akuntabilitas (<i>accountability</i>).....	18
c) Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>).....	19
d) Independensi (<i>independency</i>).....	20
e) Kewajaran (<i>fairness</i>)	20
c. Tujuan Penerapan <i>Good Corporate Governace</i>	21
2. <i>Pengertian Bank</i>.....	23
a. Bank Umum.....	23
b. Bank Syariah.....	24

3. <i>Good Corporate Governace</i> Perbankan Syari'ah Indonesia	26
4. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Setting Penelitian	33
B. Desain Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
a. Jenis Data.....	34
b. Sumber Data	34
1) Data Primer	34
2) Data Sekunder	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Variabel-Variabel Penelitian.....	38
G. Instrumen Penelitian	40
1. Uji Validitas.....	40
2. Uji Reliabelitas	41
H. Metode Pengelolaan Data	43
I. Teknik Analisis Data	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	46
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	46
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	48
3. Struktur Good Corporate Governance Bank Syariah Mandiri	49
B. Gambaran Umum Responden.....	50
1. Pengelompokan Responden Menurut jenis Kelamin	51
2. Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Umur	51
3. Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Pendidikan	52
C. Deskripsi Variabel Penelitian	52
D. Analisis Data	53
1. Uji Validitas	53
2. Uj Reliabelitas	55
E. Hasil Penelitian	57
1. Deskriptif Implementasi Prinsip Keterbukaan	57
2. Deskriptif Implementasi Prinsip Akuntabilitas	60

3. Deskriptif Implementasi Prinsip Pertanggungjawaban	63
4. Deskriptif Implementasi Prinsip Independensi	65
5. Deskriptif Implementasi Prinsip Kewajaran	67
F. Pembahasan	71
BAB V SIMPULAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Komposisi Responden Pada BSM Cabang Palembang	36
Tabel 3.2	Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.3	Skor Jawaban	44
Tabel 3.4	Skor Ideal	44
Tabel 3.5	<i>Rating Scale</i>	45
Tabel 4.1	Pengelompokan Responden Menurut Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4.2	Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Umur.....	51
Tabel 4.3	Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Penerapan Prinsip Gcg Pada BSM.....	54
Tabel 4.5	Statistik Reliabelitas.....	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabelitas Penerapan Prinsip GCG Pada BSM.....	56
Tabel 4.7	Deskripsi Pembagian dan Pengembalian Kuisisioner	57
Tabel 4.8	Rekap Jawaban Responden atas Implementasi Keterbukaan Pada BSM Cabang Palembang	58
Tabel 4.9	Rekap Jawaban Responden atas Implementasi Akuntabilitas Pada BSM Cabang Palembang	61
Tabel 4.10	Rekap Jawaban Responden atas Implementasi Pertanggungjawaban Pada BSM Cabang Palembang.....	63
Tabel 4.11	Rekap Jawaban Responden atas Implementasi Independensi Pada BSM Cabang Palembang	66
Tabel 4.12	Rekap Jawaban Responden atas Implementasi Kewajaran Pada BSM Cabang Palembang	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pt Bank Syariah Mandiri.....	50
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Kuisisioner
2. Lampiran 2 Tabulasi Hasil Data Kuisisioner
3. Lampiran 2 Perhitungan Indikator Kuisisioner
4. Lampiran 3 Perhitungan Uji Validitas
5. Lampiran 3 Hasil Uji Validitas
6. Lampiran 4 Perhitungan Uji Reliabelitas
7. Lampiran 4 Hasil Uji Reliabelitas
8. Lampiran Lembar Konsultasi Pembimbing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan perusahaan (*Corporate Governance*) dalam dunia ekonomi merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan negara. Implementasi *Good Corporate Governance* pada saat ini bukan lagi sekedar kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan memiliki kedudukan penting dalam menjalankan perannya dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* maka tidak terlepas dari bagaimana implementasi prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG menjadi mutlak diperlukan dalam mendukung kelangsungan usaha perusahaan. Sudah banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah puluhan tahun bertahan namun harus runtuh akibat praktek *bad corporate governance* yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri¹.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belumnya diimplementasikan *Good Corporate Governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha dalam mengembalikan

¹ Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* 2015

kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi² dan rekapitalisasi³, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yaitu :

- 1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian,
- 2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*,
- 3) Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank⁴.

Oleh karena itu, ketaatan akan prinsip-prinsip GCG antara lain keterbukaan (*transparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan perbankan dan segala prosedur yang ada di dalamnya haruslah terlaksana dengan baik agar perbankan dapat berkembang dengan baik dan sehat⁵.

Pelaksanaan GCG pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip dan praktik GCG pada sektor perbankan. Selain itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik *Corporate Governance* pada lembaga perbankan⁶.

² Penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia)

³ Perubahan penting tentang sifat, jenis, dan jumlah modal saham yang beredar atau jumlah agio saham yang disetor dalam suatu perseroan terbatas, termasuk penyerapan deficit (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁴ Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, 2004

⁵ Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006

⁶ *ibid*

Corporate Governance yang tidak efektif menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan *Corporate Governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan⁷.

Pentingnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga telah disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bahwa perbankan tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank sesuai dengan lima prinsip syariah, akan tetapi ditunjukkan untuk kepentingan yang lebih luas⁸. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah⁹.

Mengenai pengertian *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Di situ disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip

⁷ *Ibid*, Pedoman GCG, 2006

⁸ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (www.bi.go.id) diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 07.30

⁹ *Ibid*, Peraturan Bank Indonesia

tranparancy (transparan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggung jawab) *independensi* (independen), dan *fairness* (kewajaran)¹⁰.

Good Corporate Governance sering disebut sebagai pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 pasal 1 angka 6 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia¹¹.

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG, BSM melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif. Penerapan GCG di BSM membaik pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat kepatuhan BSM dalam menerapkan GCG menggunakan *checklist (self assessment)* di mana hasil penilaiannya dalam bentuk indeks¹².

Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSM sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PBI tersebut¹³.

Implementasi pelaksanaan GCG di BSM mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 7 Desember dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs/2010 tanggal 30 April 2010 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

¹¹ www.syariahamandiri.co.id

¹² *Standard checklist* yang dibuat oleh *Forum For Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) yang bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB). Hasil penilaian secara *Self Assessment* (SA) tahunan terus membaik sebagaimana hasil pengukuran oleh jajaran Bank Syariah Mandiri yang hasilnya berupa indeks GCG semesteran (semester II 2009 = 91,88 kategori ‘Lebih Baik’ meningkat dari semester I 2009 = 88,36 kategori ‘Lebih Baik’).

¹³ *Ibid*

Syariah yaitu penerapan 5 prinsip dasar yaitu keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Oleh karena itu, penulis akan membuat penulisan tugas akhir tentang prinsip *Good Corporate Governance* di bank syariah dengan studi kasus di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang. Penulis mengajukan tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PALEMBANG ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: “Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang?”

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka penulis memberikan batasan pada implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

D. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan adalah “untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang”.

E. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah informasi, wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam kajian prinsip *Good Corporate Governance* dalam aspek keterbukaan di Bank Syariah Mandiri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh pada kinerja karyawan dan motivasi Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang agar dapat selalu berkembang.

F. Orisinalitas Penelitian

Penulis menganalisa tentang “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang”. Di bawah ini akan dijelaskan perbedaan dan persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu :

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Prasetyo (2013) Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Studi Kasus: Bank BII Cabang Utama Surabaya) ¹⁴	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Perbankan	Jenis penelitian Andi metode deskriptif teknik pengambilan sampel dilakukan secara <i>purposive sampling</i> . Sementara peneliti menggunakan metode analisis deskriptif teknik pengambilan sampel dengan <i>total sampling</i> .
2.	Bena Eka Putri (2014) Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Purnama Semesta Alamiah	Untuk mengetahui sejauh mana penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Objek penelitian dibidang LPG jenis penelitian kualitatif teknik wawancara, sedangkan objek teliti penulis adalah bank, jenis penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan kuesioner.
3.	Diana Fajarwati (2011) Analisis Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta ¹⁵	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Objek penelitian Diana pada Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sementara peneliti ini di Bank Syariah Mandiri
4.	Rian Ikmal Darmawan (2013) Analisa Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ¹⁶	Untuk mengetahui sejauh mana penerapan GCG	Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. BNI Tbk, sumber data sekunder yang berasal dari kajian literatur (<i>Library Research</i>) Selain penerapan peneliti juga meneliti kendala-kendalanya, sedangkan penulis hanya meneliti sejauh mana penerapan GCG jenis penelitian analisis deskriptif teknik kuesioner.

¹⁴Prasetyo, Andi. 2013. "Implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Studi Kasus: Bank BII Cabang Utama Surabaya)". *Jurnal Akuntansi UNESA*. Volume 1, No. 3. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2291/4087>. (diakses 18 Oktober 2016).

¹⁵Fajarwati, Diana. 2011. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta". *Skripsi*. Depok: Program Studi Administrasi Negara Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. (tidak diterbitkan)

¹⁶Darmawan, Ikmal Rian. 2013. "Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Volume 2, No. 1. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/828> . (diakses 18 Oktober 2016).

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Ristifani (2009) Analisis Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ¹⁷	Penerapan prinsip GCG. Teknik kuesioner	Selain meneliti penerapan GCG penelitian Ristifani juga meneliti hubungannya terhadap kinerja. Sementara penulis hanya meneliti penerapan prinsip GCG pada BSM Cabang Mandiri.
6.	Rully Trihantana (2015) Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 ¹⁸	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan objek adalah bank	Penelitian mengumpulkan data dengan kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen perusahaan yang terkait dengan GCG. Sementara penulis hanya dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner.
7.	Yusri Putri riandri (2012) Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Untuk Mengelola Risiko Perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar) ¹⁹ .	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dan objek sama bank	Penelitian Yusri menggunakan Metode Verifikatif sedangkan penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis penelitian yang dilakukan Yusri adalah penerapan GCG untuk mengelola Risiko Perbankan pada Bank.

G. Sistematika Penulisan

¹⁷Ristifani. 2009. "Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma.

¹⁸Trihantana, Rully. 2015. "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009. *Jurnal Online Perbankan Syariah*. Volume 1, No 2. <http://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/670> . 10 November 2016

¹⁹Yusri Putri riandri, 2012. "Implementasi *Good Corporate Governance* Untuk Mengelola Risiko Perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar)".

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian yang terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Penelitian Terdahulu dan Kajian Teoritis

BAB III. METODE PENELITIAN

Setting Penelitian, *Desain* Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Populasi Dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Variabel-Variabel Penelitian, Instrumen Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian terdiri atas sejarah ringkas, visi misi dan struktur organisasi Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang. Analisis data terdiri dari uji validitas dan uji rentabilitas dan hasil penelitian.

BAB IV. PENUTUP

Terdiri atas Kesimpulan, Saran-Saran, dan Penutup. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Daftar Pustaka,

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate overnance.*

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committe tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*)²⁰ yang sangat menentukan bagi praktik *Good Corporate Governance* di seluruh dunia. Definisi *Good Corporate Governance* dari Cadbury Committee yang berdasarkan teori *stakeholders* adalah sebagai berikut:

“ *A set of rule define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibility*”²¹

Good Corporate Governance adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan

²⁰ *Turning Point* adalah sebuah 'titik balik' atau 'pengalihan' yang mana posisinya bisa ditempatkan pada awal atau akhir atau mungkin juga di tengah-tengah cerita. *Turning point* itu juga dapat diartikan di mana cerita yang kita anggap akan berakhir, ternyata berubah atau berbelok ke arah baru.

²¹ Terjemahan “ seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”

mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar²².

Good Corporate Governance (GCG) menurut OECD 2003 dalam Zarkashi, (2008 : 35) adalah tata kelola yang baik (*good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *Stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja²³.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dalam Anshori (2009:79). Dari berbagai pengertian tentang *good corporate governance* di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *good corporate governance* adalah prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh berbagai lembaga termasuk lembaga keuangan guna untuk menyeimbangkan antara kewenangan dan kewenangan perusahaan²⁴.

Di sisi lain pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia bagi perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *bank for international settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip

²² Fahmi Irham, *Etika Bisnis ; Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 62

²³ *Organization for economic corporation and development* (OECD). 1999. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*.

²⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang *Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (www.bi.go.id) diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 07.30

kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional.

Good Corporate Governance suatu sistem yang mengatur hak dan kewajiban pada pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah perusahaan, seperti yang terdapat dalam pedoman dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006), *good corporate governance* adalah:

“Salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim kondusif”.

Sedangkan pengertian *corporate governance* menurut *forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001:3) adalah :

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Corporate Governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Penerapan *Corporate governance* memberikan empat manfaat (FCGI, 2001; 4), yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang ada pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's values* dan dividen.

b. Prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam praktik *corporate governance* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *corporate governance* juga akan berbeda (G. Suprayitno, et al, 2000:18).

Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi *Good Corporate Governance* perusahaan (Deni Darmawati, 2006). Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar GCG harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti

besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya. (Wilson Arafat, 2008:9)

Prinsip-prinsip mengenai *corporate governance* memiliki banyak versi, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan. Untuk penelitian ini prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah prinsip-prinsip yang dikenal sebagai “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*).

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan umum memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

“*Pertama* transparansi (*transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. *Kedua*, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. *Ketiga*, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. *Keempat*, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. *Kelima*, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”²⁵.

²⁵ *Ibid*, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006,.

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (2004) yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) memaparkan mengenai arti dari kelima prinsip tersebut, yakni:

“Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate value*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fainess*)”²⁶.

a) Keterbukaan (*Transparency*).

Menurut Sutedi (2011; 11) transparansi yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola.

²⁶ Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2004, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia.

Menurut Iman dan Amin (2002; 16), dalam hal ini, kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam prinsip transparansi adalah:

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dipertimbangkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut²⁷.

b) Akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Banyak perusahaan di Asia dikontrol oleh kelompok kecil pemegang saham atau pemilik keluarga (*family owned*). Hal ini menimbulkan masalah dalam mempertahankan objektivitas dan pengungkapan yang memadai (*adequate disclosure*). (Sutedi, 2012:11)

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ bank dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai bank (*corporate value*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

²⁷Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia

4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ bank dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati²⁸.

c) Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-lainnya.

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai²⁹.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

d) Independensi (*Independency*).

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1. Masing-masing organ bank harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain³⁰.

e) Kewajaran (*Fairness*).

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

³⁰ *Ibid*

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik³¹.

c. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*.

Menurut Ali (2009: 79) tujuan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Tujuan penerapan GCG dalam Sutedi (2011: 10) adalah membuat keseimbangan dan pengawasan sistem untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber-sumber *corporate* dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengambilan risiko yang tepat dan kelangsungan hidup (*sustainability*).

³¹ *Ibid*

Mr. Wolfensohn presiden bank dunia dalam Chapra (2008:18) tujuan dari diterapkannya *Good Corporate Governance* adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Chapra (2008:18) menyebutkan bahwa tujuan penerapan *Good Corporate Governance* adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh *stakeholder* melalui menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Keadilan bagi *stakeholder* juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai wajar atas penyertaan mereka.

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN berlandaskan Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 pasal 4 adalah³² :

1. Memaksimalkan BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

³² Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-Mbu/2002 Tentang Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada BUMN, pasal 4

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Menyukseskan program privatisasi BUMN

Tujuan lain dari *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Secara teoritis, praktik *corporate governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Emrinaldi, 2007).

2. Pengertian Bank

a. Bank Umum

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank selalu akan menghadapi resiko maupun pendapatan (*risk and re- turn*). Secara garis besar resiko dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: resiko yang sistematis (*systematic risk*) dan resiko yang non sistematis (*unsystematic risk*)³³. Adapun resiko yang mungkin dihadapi bank syari'ah adalah resiko modal, resiko

³³ *Systematic risk* ialah resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Sedangkan *unsystemic risk* ialah resiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

pembiayaan, resiko operasional maupun resiko likuiditas³⁴. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”.

Menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud Bank adalah *Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.³⁵

b. Bank Syariah

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980³⁶.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Edisi Revisi 2005, hal.

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm. . 24

³⁶ Ibid, hal. 167

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991³⁷. Dalam perkembangan selanjutnya 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti yang merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia³⁸.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akte pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Selain itu juga ada Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah³⁹.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : K E N C A N A Prenadamedia Group, Edisi Pertama 2011), hlm. 31

³⁹ *Ibid*, hlm. 33

3. *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah Indonesia

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlements* (BIS)⁴⁰. Sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh

⁴⁰ *The Bank for International Settlements* (BIS) adalah organisasi internasional yang bergerak dalam kerja sama bank sentral di bidang keuangan dan moneter internasional. Organisasi tersebut didirikan pada 17 Mei 1930. BIS sebenarnya didirikan sebagai salah satu usaha untuk menciptakan kerjasama internasional mengenai masalah keuangan, diantaranya, menyangkut hal yang berhubungan dengan pampasan dan utang perang. Organisasi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan pembayaran oleh para pihak yang berhutang kepada negara-negara lain di dunia, juga untuk dapat berperan sebagai bank sentral bagi bank-bank sentral yang ada, serta mengusahakan jalinan kerja sama diantara bank sentral di dunia. Peran yang sekarang menonjol dari BIS, yaitu sebagai lembaga yang menjalankan penelitian dan pengembangan tentang masalah- masalah keuangan dunia.

stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)⁴¹

Khusus bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, harus memiliki Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*di-recting*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syari'ah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syari'ah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syari'ah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syari'ah Islam. *Stakeholders* lainnya yang penting dari bank adalah deposan, penabung dan pemegang giro, debitur serta karyawan. Antara bank dengan *stakeholders* tersebut perlu dijalin hubungan bisnis sesuai dengan azas kesetaraan dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak⁴².

4. Penerapan *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*,

⁴¹Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2004

⁴²M. Umer Chapra Dan Habib Ahmed, *Corporate Governance; Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008 hal .42

sehingga BSM dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

BSM berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG. Hal itu diwujudkan dalam: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank
2. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal
3. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana berskala besar
5. Rencana strategis bank
6. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

Untuk mengoptimalkan penerapan GCG, BSM melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi internal yang mengarah kepada praktik terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang efektif. Penerapan GCG di BSM membaik pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran tingkat kepatuhan BSM dalam menerapkan GCG menggunakan *checklist (self assessment)* di mana hasil penilaiannya dalam bentuk *index*. Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BSM sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam PBI tersebut.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Andi Prasetyo (2013) “Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Studi Kasus: Bank BII Cabang Utama Surabaya)” ⁴³	Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Deskriptif dengan persentase	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan GCG di Surabaya Cabang Utama dari Bank BII di 94,07% yang berarti telah menerapkannya dengan baik. Sementara hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cab Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik.
2.	Bena Eka Putri (2014) “Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Purnama Semesta Alamiah”	Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Kualitatif	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Purnama Semesta Alamiah sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai prinsip <i>transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness</i> . Sementara hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik.

⁴³ Prasetyo, Andi. 2013. “Implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Studi Kasus: Bank BII Cabang Utama Surabaya)”. *Jurnal Akuntansi UNESA*. Volume 1, No. 3. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2291/4087> . (diakses 18 Oktober 2016).

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	Diana Fajarwati (2011) “Analisis Penerapan Prinsip- prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta” ⁴⁴	Penerapan Prinsip- prinsip GCG di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta	Metode Deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> telah diterapkan di lingkungan Perum Bulog namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Sementara hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik.
4.	Rian Ikmal Darmawan (2013) “Analisa Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk” ⁴⁵	Penerapan Prinsip-prinsip GCG dan kendala-kendala yang dialami dalam penerapan.	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip GCG yang meliputi transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban, akuntabilitas dan kewajaran pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Sementara hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik.

⁴⁴ Diana Fajarwati, “Analisis Penerapan Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* Di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta”, 2011.

⁴⁵ Darmawan, Ikmal Rian. 2013. “Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Volume 2, No. 1. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/828> . (diakses 18 Oktober 2016).

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	Ristifani (2009) “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. ⁴⁶	Hubungan implementasi prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap kinerja pada kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Deskriptif Analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan variabel memperoleh nilai sebesar 84,65% dan 84%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip GCG dan pelaksanaan kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah dilaksanakan dengan baik, hubungan Implementasi prinsip-prinsip GCG Terhadap Kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan hasil perhitungan korelasi <i>rank spearman</i> sebesar 0,914 atau 91,40% yang artinya mempunyai hubungan searah yang sangat kuat. Sementara Hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cab Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik.

⁴⁶ Ristifani. 2009. “Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
6.	Rully Trihantana (2015) “Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009 ⁴⁷	Pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan berpedoman pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs	Metode Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan dan telah sesuai dengan landasan pelaksanaan GCG pada BUS PBI No. 11/33/PBI/2009. Sementara hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik
7.	Yusri Putri Riandri (2012), “Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> Untuk Mengelola Risiko Perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar)” ⁴⁸	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> untuk mengelola risiko perbankan	Metode Verifikatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG untuk mengelola risiko perbankan dikatakan cukup baik meskipun terdapat kendala yang dihadapi. Sementara hasil keseluruhan penerapan GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dikategorikan sangat baik.

⁴⁷ Trihantana, Rully. 2015. “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009. *Jurnal Online Perbankan Syariah*. Volume 1, No 2. <http://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/670> . (diakses 10 November 2016)

⁴⁸ Yusri Putri riandri, 2012. “Implementasi *Good Corporate Governance* Untuk Mengelola Risiko Perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar)”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Setting Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* pada Perbankan. Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No.08, Ilir Barat. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan segenap jajaran BSM dalam menerapkan *Good Corporate Governance*.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian⁴⁹. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh dari objek yang diteliti melalui perhitungan skala pengukuran data yaitu prosedur pemberian angka pada suatu objek agar dapat menyatakan karakteristik dari objek⁵⁰. Pengukuran instrumen penelitian data diperoleh melalui kuesioner untuk menilai sikap atau perilaku sering dinyatakan dengan data interval⁵¹. Skala pengukuran instrumen dengan

⁴⁹ Rakim, "*Desain Penelitian*", diakses dari <http://rakim-ypk.blogspot.in/2008/06/desain-penelitian.html>, pada tanggal 26 Agustus 2016 pukul 09.10

⁵⁰ Sofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 134

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 136

menggunakan skala Likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan menjadi indikator, dari indikator dijabarkan menjadi sub indikator yang dapat diukur. Akhirnya sub indikator dapat dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden⁵².

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁵³

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan pengumpulan data.⁵⁴

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari⁵⁵. Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini

⁵² *Ibid.*, hlm. 138

⁵³ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 21

⁵⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 27

⁵⁵ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

adalah data yang diperoleh melalui kuesioner dan data observasi yang dilakukan dengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian⁵⁶. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian⁵⁷.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menurut Sugiyono (2008: 115) adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan⁵⁸. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri Sumatera Selatan Cabang Palembang.

Populasi dalam penelitian ini meliputi Dewan Komisaris, Komite-komite, Dewan Direksi, Divisi-divisi yang terkait dengan pelaksanaan GCG pada Bank Syariah Mandiri Sumatera Selatan Cabang Palembang (Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Biro

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 11.

⁵⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm.123.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 115

Direksi). Berikut ini disajikan mengenai komposisi jumlah responden pada Bank Syariah Mandiri Sumatera Selatan Cabang Palembang.

Tabel 3.1
Komposisi responden pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang

Jabatan Responden	Jumlah (orang)
Direksi	4
Dewan Pengawas dan Komite-komite	6
Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan	6
Satuan Kerja Audit Intern	8
Biro Direksi	6
Jumlah	30

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.⁵⁹, penelitian ini memiliki 30 populasi untuk diteliti, maka teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *sampling* jenuh, di mana seluruh populasi sebanyak 30 orang diambil sebagai sampel. *Sampling* jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. *Sampling* jenuh sering juga disebut *total sampling*⁶⁰.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data⁶¹. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

⁵⁹ Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta. Hlm. 55

⁶⁰ Hendry, *Populasi Dan Sampel*, <https://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/populasi-dan-sampel.html>, diakses 16 September 2016, pukul 9.45 WIB.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 224

1. Kuisioner atau angket menurut Sugiyono (2003: 199) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab⁶². Dalam penelitian ini digunakan skala Likert 5 poin, di mana skor 5 untuk pilihan “Sangat setuju”, skor 4 untuk pilihan “Setuju”, skor 3 untuk pilihan ”Kurang setuju”, skor 2 untuk pilihan ”Tidak setuju”, dan skor 1 untuk pilihan ”Sangat tidak setuju”. Skala Likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu⁶³.
2. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas)⁶⁴.

⁶² Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 199

⁶³ Sofian Siregar, *Op. Cit.* hlm. 138

⁶⁴ Ali Samiun, *Pengertian Observas dan Jenis Observasi*, <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html>, diakses 16 September 2016, Pukul 9.30 WIB.

F. Variabel-Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan bank yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.
2. Keterbukaan (*transparency*) adalah sistem pengelolaan bank yang dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang materil dan relevan mengenai BSM Cabang Palembang.
3. Akuntabilitas (*accountability*) adalah sistem pengelolaan bank yang menetapkan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ BSM Cabang Palembang sehingga pengelolaan bank terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah sistem pengelolaan BSM Cabang Palembang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.
5. Independensi (*independency*) adalah sistem pengelolaan BSM Cabang Palembang secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.
6. Kewajaran (*fairness*) adalah sistem pengelolaan BSM Cabang Palembang berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel	Subvariabel	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Good Corporate Governance</i>	Keterbukaan (<i>transparency</i>)	• Mengungkapkan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan haknya. • Informasi yang diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank, kondisi keuangan, kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, manajemen risiko, pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya. • Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. • Kebijakan bank harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	Skala Ordinal
	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	• Tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. • Semua organ dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. • Memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan bank. • Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran bank yang konsisten dengan sasaran usaha bank, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. • Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ bank dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.	Skala Ordinal
	Pertanggung-jawaban (<i>responsibility</i>)	• Organ bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan • Bank melaksanakan tanggung jawab sosial, peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan.	Skala Ordinal
	Independensi (<i>independency</i>)	• Masing-masing organ bank menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, sehingga pengambilan	Skala Ordinal

		keputusan dapat dilakukan secara obyektif. • Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.	
	Kewajaran (<i>fairness</i>)	• Bank memberi kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. • Bank memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada <i>stakeholders</i> sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. • Bank memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan lainnya.	Skala Ordinal

G. Instrumen Penelitian

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner, maka data perlu diuji tingkat validitas dan realibilitasnya. Dalam hal ini pengujian validitas dan realibilitas dilakukan dengan bantuan program *Microsoft Excel*. Analisis data dari pengolahan data hasil dari jawaban kuesioner diolah dengan menggunakan bantuan alat komputer SPSS (*Statistical Package for Social Science*) for Windows⁶⁵ and Excel.

1. Uji Validitas Alat Ukur

Valid menurut Irawan⁶⁶ berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Secara umum uji validitas adalah untuk melihat apakah item pertanyaan yang dipergunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur. Suatu alat ukur yang valid tidak sekedar mampu

⁶⁵Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, Edisi I, 2008.

⁶⁶Prasetya Irawan, *Op.Cit*, hlm. 159

mengungkapkan data dengan tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut, artinya pengukuran tersebut mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya di antara subjek yang satu dengan subjek yang lain. Uji validitas berhubungan dengan suatu pengujian butir-butir dalam kuisioner yang akan digunakan.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing indikator dengan menggunakan korelasi *product moment* pada taraf signifikansi 0,05.

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Kemudian dihitung dengan Uji-t dengan rumus: $t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$,

selanjutnya disimpulkan dengan kaidah pengambilan keputusan: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak valid. (Riduwan, 2007:110) Apabila suatu alat telah dinyatakan valid, maka tahap selanjutnya adalah mengukur realibilitas data tersebut.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu petunjuk sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabel menurut Irawan⁶⁷ berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Inti dari reliabilitas adalah sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat

⁶⁷ Prasetya Irawan, *Op.Cit*, hlm. 115

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda, dapat dipercaya atau andal bila dilakukan pengulangan pengukuran terhadap subjek yang sama.

Realibilitas menunjukkan konsistensi data tersebut, sehingga siapa pun yang mengujinya akan memperoleh hasil yang sama. Pengujian realibilitas yang akan dilakukan yakni pengujian dengan menggunakan metode *alpha*, langkah-langkah mencari nilai realibilitas dengan rumus *alpha* adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Menghitung *varians* skor tiap-tiap item dengan rumus:

$$S_i = \frac{\sum X_i^2 - \left(\frac{\sum X_i^2}{N} \right)}{N}$$

Langkah 2: Menjumlahkan *varians* semua item dengan rumus:

$$\sum S_i = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$$

Langkah 3: Menghitung *varians* total dengan rumus:

$$S_t = \frac{\sum X_t^2 - \left(\frac{\sum X_t^2}{N} \right)}{N}$$

Langkah 4: Masukkan nilai *alpha* dengan rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_t} \right)$$

H. Metode Pengolahan Data

1. Tabulasi, mengelompokkan data yang diteliti kemudian disusun secara teratur dan selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel.
2. Precessing data, yaitu data yang telah ditabulasi kemudian diolah atau diproses dalam bentuk matematis dengan menggunakan model analisis yang telah ditentukan.
3. Interpretasi data, yaitu data yang telah diproses dalam bentuk matematis akan dianalisis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

I. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan cara memberikan penjelasan mengenai implementasi GCG pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang berdasarkan persentase jawaban responden pada masing-masing pernyataan dalam kuesioner, kuesioner menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiono Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial⁶⁸.

⁶⁸ Sugiyono, *Op.Cit*, hal. 93

a. Penentuan Skor Jawaban

Merupakan nilai jawaban yang akan diberikan oleh responden, menurut Sugiono hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan skor dari tiap jawaban yang akan diberikan. Contohnya, sikap yang akan kita pakai yaitu "*setuju*". Selanjutnya kita menentukan banyaknya jawaban pada tiap pertanyaan yang akan kita berikan, misalnya 5 skala. Hal ini bertujuan agar responden dapat memberikan penilaian sesuai dengan kriteria mereka berdasarkan pilihan yang ada. Berikut 5 skala likert dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3.3

Skala Jawaban	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

b. Skor Ideal

Skor ideal merupakan skor yang digunakan untuk menghitung skor untuk menentukan *rating scale* dan jumlah seluruh jawaban. Untuk menghitung jumlah skor ideal dari seluruh item, digunakan rumus berikut,

$$\text{Skor Ideal} = \text{Nilai Skala} \times \text{Jumlah Responden}$$

Skor tertinggi adalah 5 dan jumlah responden 30, maka dapat dirumuskan menjadi:

Tabel 3.4

Rumus	Skala
$5 \times 30 = 150$	SB
$4 \times 30 = 120$	B
$3 \times 30 = 90$	CB
$2 \times 30 = 60$	KB
$1 \times 30 = 30$	SKB

Selanjutnya semua jawaban responden dijumlahkan dan dimasukkan ke dalam

rating scale dan ditentukan daerah jawabannya.

c. Rating Scale

Rating scale berfungsi untuk mengetahui hasil data angket atau kuisioner secara umum dan keseluruhan yang didapat dari penilaian angket atau kuisioner. Dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 3.5

Nilai Jawaban	Skala
121-150	SB
91-120	B
61-90	CB
31-60	KB
0-30	SKB

d. Persentase Persetujuan

Sedangkan untuk mengetahui jumlah jawaban dari para responden melalui persentase, yaitu digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{K}{n} \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase yang diharapkan

n = Jumlah skor GCG yang diharapkan

(jml responden yang menjawab × jml dimensi × jml pertanyaan)

K = jumlah skor GCG yang diperoleh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri, pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertaruhan bagi *bankir* syariah. Bila BSM berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila BSM gagal, maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena BSM merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah. Ternyata BSM dengan cepat mengalami perkembangan. Pendirian Bank Syariah Mandiri diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya⁶⁹.

Di sisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (*merger*) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). PT. BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Untuk

⁶⁹ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta : K E N C A N A Prenadamedia Group, Edisi Pertama 2011), hlm. 31

keluar dari krisis ekonomi, PT. BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk⁷⁰.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

⁷⁰ www.syariahamandiri.co.id

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab H atau tanggal 1 November 1999⁷¹.

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dengan harmonisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

a. Visi Bank Syariah Mandiri

1. Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate*.
2. Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

⁷¹ *Ibid*

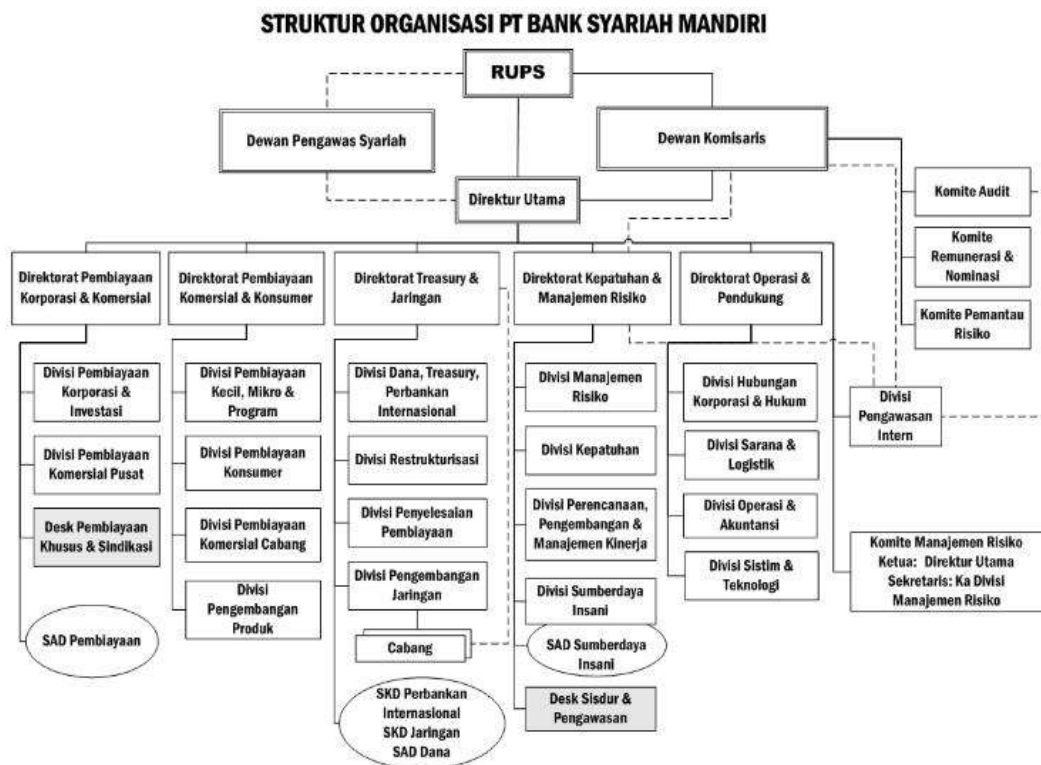
b. Misi Bank Syariah Mandiri

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada *segmen* ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.

3. Struktur *Good Corporate Governance* Bank Syariah Mandiri

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka struktur GCG BSM terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Setiap struktur GCG BSM wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlandaskan pada prinsip independensi bahwa masing-masing organ melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan BSM.

Gambar. 4.1



B. Gambaran Umum Responden

Dalam gambaran umum mengenai responden ini akan disajikan data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan pada 17 orang responden. Pengumpulan data dari penelitian Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang, dilakukan dengan cara kuisisioner dan observasi secara langsung untuk memperoleh data primer maupun informasi yang relevan dengan permasalahannya. Dalam laporan ini akan disajikan data mengenai profil responden yang terdiri atas jenis kelamin, umur, dan pendidikan.

1. Pengelompokan Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 4.1

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	21	70
2.	Perempuan	9	30
	Jumlah	30	100

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2016.

Dari tabel 4.1 tersebut dilihat bahwa dari 30 responden yang diteliti ternyata 21 responden dengan persentase 70 % adalah laki – laki dan 9 responden dengan 30 % merupakan perempuan dan sesuai dengan tabel tersebut responden terbanyak adalah laki – laki.

2. Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Umur

Tabel 4.2

No.	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	21-30 tahun	25	83
2.	31-40 tahun	5	17
	Jumlah	30	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016.

Dari data tabel 4.2 tersebut dapat diketahui bahwa komposisi umur responden yang jumlahnya paling banyak adalah responden yang umurnya berkisar antara 21 sampai 30 tahun berjumlah 25 responden atau 83%, sementara responden yang berumur dengan kisaran 31 sampai 40 tahun berjumlah 5 responden atau 17%. Dari data tabel di atas dapat dilihat responden menurut umur yang paling banyak adalah responden dengan 21 sampai 30 tahun.

3. Pengelompokan Responden Menurut Tingkat Pendidikan.

Latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam kehidupannya di masyarakat. Di samping itu latar belakang pendidikan akan menjadi dasar berpikir dan mengungkapkan pendapat dalam mengambil keputusan termasuk di dalamnya menjadi nasabah. Tabel di bawah ini disajikan data responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.3

No .	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sekolah Menengah Atas	6	20
2.	Strata 1	24	80
	Jumlah	30	100

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016.

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas berjumlah 6 responden dengan persentase 20%. Latar pendidikan Strata 1 berjumlah 24 responden dengan persentase 80%. Latar belakang Strata 1 merupakan responden yang terbesar, yakni sebanyak 24 responden atau 80% dan sebalik responden terkecil latar belakang Sekolah Menengah Atas.

C. Deskripsi Variabel Penelitian

Pada diskripsi variabel penelitian akan dibahas tentang tanggapan responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian , yaitu : Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

D. Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen pengukur yang telah disusun mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa cermat suatu uji melakukan fungsi ukurannya. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kekeliruan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel dengan menggunakan rumus korelasi *Pearson* (*Product Moment Pearson*).

Sebuah kuisisioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi antara skor item kuesioner dengan total dari sebuah variabel lebih besar dari koefisien korelasi yang ada dalam tabel distribusi korelasi ($r_{hitung} > r_{tabel}$), atau dalam *print out* komputer yang menggunakan program SPSS versi 16, korelasi tersebut signifikan pada $\alpha = 0,05$ (nilai signifikan $< 0,05$).

Berdasarkan dari data kuisisioner yang disebar terdiri dari 30 orang responden, dengan 5 indikator dan masing-masing terdapat beberapa pernyataan. Keterbukaan (*transparency*) dengan 4 item pernyataan, akuntabilitas (*accountability*) dengan 5 item pernyataan, pertanggungjawaban (*responsibility*) dengan 2 item pernyataan, independensi (*independency*) dengan 2 item pernyataan dan kewajaran (*fairness*) dengan 3 item pernyataan.

Dari hasil perhitungan dengan rumus dan data yang diolah oleh SPSS versi 16 tersebut (Lampiran 6), maka diperoleh hasil uji validitas pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*
Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang

Indikator Variabel	No Item Pernyataan	Koefisien Korelasi r_{hitung}	Harga t_{hitung}	Harga r_{tabel}	Harga t_{tabel}	Keputusan
Keterbukaan (<i>transparency</i>)	1	0,776	6,508	0,361	1,701	Valid
	2	0,584	3,808	0,361	1,701	Valid
	3	0,666	4,722	0,361	1,701	Valid
	4	0,522	2,776	0,361	1,701	Valid
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	1	0,845	8,355	0,361	1,701	Valid
	2	0,606	4,027	0,361	1,701	Valid
	3	0,857	8,804	0,361	1,701	Valid
	4	0,611	4,081	0,361	1,701	Valid
	5	0,849	8,507	0,361	1,701	Valid
Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	1	0,809	7,279	0,361	1,701	Valid
	2	0,842	8,265	0,361	1,701	Valid
Independensi (<i>independency</i>)	1	0,796	6,962	0,361	1,701	Valid
	2	0,783	6,661	0,361	1,701	Valid
kewajaran (<i>fairness</i>)	1	0,948	15,773	0,361	1,701	Valid
	2	0,793	6,890	0,361	1,701	Valid
	3	0,861	8,949	0,361	1,701	Valid

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2016.

Berdasarkan pada Tabel 4.4 di atas, dapat diperoleh informasi bahwa semua item kuisioner yang digunakan untuk mengukur penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang adalah valid (signifikan) sehingga semua data yang terkumpul melalui kuisioner ini dapat dipercaya dan semua item dapat diikutsertakan untuk menguji reliabilitas kuisioner.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji realibilitas dilakukan terhadap pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten sehingga siapa pun yang mengujinya akan memperoleh hasil yang sama. Uji reabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *alpha*.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus tersebut (Lampiran 6), maka diperoleh uji realibilitas implementasi *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

Tabel 4.5
Statistik Reliabeltas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.866	16

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

Berdasarkan hasil pencarian dengan menggunakan spss versi 16 maka diperoleh *Cronbach's Alpha* sebesar 0,866 yang berarti data yang diteliti konsisten atau reliabel, karena nilai alpha yang didapat antara 0,70 – 0,90. Selain itu juga dapat dilihat dari rtabel, nilai *alpha* 0,866 > dari nilai r_{tabel} 0,374.

Untuk lebih memastikannya lagi tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan dan konsistennya. Uji reliabel juga dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus, (lampiran 6) berikut hasil uji reliabelitas dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Hasil Uji Realibilitas Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*
pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab Palembang

Indikator Kuisisioner	Koefisien Korelasi (r)		Keputusan
	Hitung	Tabel	
Keterbukaan (<i>transparency</i>)	0,516	0,374	Reliabel
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	0,814	0,374	Reliabel
Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	0,530	0,374	Reliabel
Independensi (<i>independency</i>)	0,387	0,374	Reliabel
Kewajaran (<i>fairness</i>)	0,837	0,374	Reliabel

Sumber: Data primer diolah tahun 2016

Berdasarkan pada Tabel 4.6 di atas, dapat diperoleh informasi bahwa kuisisioner yang digunakan untuk mengukur penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang adalah reliabel (signifikan) sehingga ketepatan kuisisioner ini dapat digunakan pada waktu yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa kuisisioner yang dibuat ketepatannya konsisten jika digunakan lagi pada waktu yang akan datang untuk mengukur gejala yang sama.

E. Hasil Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban atas kuisisioner yang dibagikan kepada 30 orang responden pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang. Deskripsi mengenai pembagian dan pengembalian kuisisioner penelitian ditunjukkan dalam Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Deskripsi Pembagian dan Pengembalian Kuisisioner

No.	Uraian	Jumlah (rangkap)	Persentase (%)
1.	Kuisisioner yang dibagi	30	100
2.	Kuisisioner yang tidak kembali	0	0
3.	Kuisisioner yang kembali	30	100
4.	Kuisisioner yang dapat dianalisis	30	100
5.	Kuisisioner yang tidak dapat dianalisis	0	0

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kuisisioner yang kembali (*responden rate*) pada responden sangat tinggi yaitu sebesar 100%. Selanjutnya tanggapan responden pada masing-masing pernyataan dalam kuisisioner akan diuraikan sebagai berikut:

1. Deskriptif Implementasi Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan *transparansi*, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola. Dari data kuisisioner yang terdiri dari 30 orang responden, dengan indikator keterbukaan dan 4 item pernyataan serta diolah oleh SPSS maka dapat dilihat hasil pada tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi
Prinsip Keterbukaan (*transparency*) pada BSM Cabang Palembang

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total	Persentase Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1.	Bank menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dipertimbangkan serta mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> sesuai dengan haknya.	16	14	0	0	0	30	53,3	46,7	0	0	0
2.	Informasi yang diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank, kondisi keuangan, kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, manajemen risiko, pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.	10	20	0	0	0	30	33,3	66,7	0	0	0
3.	Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.	15	15	0	0	0	30	50,0	50,0	0	0	0
4.	Kebijakan bank harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).	18	12	0	0	0	30	60,0	40,0	0	0	0
Total		59	61	0	0	0		196,6	203,4	0	0	0
		295	244	0	0	0		983	813,6	0	0	0
		539						1796,6				

Berdasarkan hasil tabel 4.8 di atas untuk item pernyataan 1 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 16 orang responden dengan persentase 53,3%. Sementara tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 14 orang responden dengan persentase 46,7% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS) tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 2 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 10 orang responden dengan persentase 33,3%. Tanggapan responden yang yang menjawab setuju (S) adalah 20 orang responden dengan persentase 66,7%, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 3 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 15 orang responden dengan persentase 50,0%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 15 orang responden dengan persentase 50% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 4 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 18 orang responden dengan persentase 60,0%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 12 orang responden dengan persentase 40,0% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Berdasarkan data kuesioner mengenai prinsip keterbukaan (*transparency*) yang terdiri atas 4 item pernyataan kepada 30 orang responden (Lampiran 3) dan tabel 4.8, maka besarnya tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator keterbukaan (*transparency*) pada BSM Cabang Palembang dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{539}{30 \times 5 \times 4} \times 100\% = \frac{539}{600} \times 100\% = 89,33\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator keterbukaan (*transparency*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 89,33%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

2. Deskriptif Implementasi Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. Dari data kuisisioner yang terdiri dari 30 orang responden, dengan indikator akuntabilitas dan 5 item pernyataan serta diolah oleh SPSS maka dapat dilihat hasil pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi
Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) pada BSM Cabang Palembang

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total	Persentase Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1.	Bank menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ bank dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai bank, dan strategi bank.	16	14	0	0	0	30	53,3	46,7	0	0	0
2.	Bank meyakini bahwa semua organ dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.	11	19	0	0	0	30	36,7	63,3	0	0	0
3.	Bank memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan bank.	14	16	0	0	0	30	46,7	53,3	0	0	0
4.	Bank memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran bank yang konsisten dengan sasaran usaha bank, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi	9	21	0	0	0	30	30,0	70,0	0	0	0
5.	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ bank dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman prilaku yang telah disepakati.	15	15	0	0	0	30	50,0	50,0	0	0	0
Total		65	85	0	0	0		216,7	283,3	0	0	0
		325	340	0	0	0		1083,5	1133,2	0	0	0
		665						2216,7				

Berdasarkan hasil tabel 4.9 di atas untuk item pernyataan 1 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 16 orang responden dengan persentase 53,3%. Sementara tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 14 orang responden dengan persentase 46,7% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS) tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 2 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 11 orang responden dengan persentase 36,7%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 19 orang responden dengan persentase 63,3%, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 3 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 14 orang responden dengan persentase 46,7%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 16 orang responden dengan persentase 53,3% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 4 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 9 orang responden dengan persentase 30,0%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 21 orang responden dengan persentase 70,0% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 5 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 15 orang responden dengan persentase 50,0%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 15 orang responden dengan persentase 50,0% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Berdasarkan data kuesioner mengenai prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang terdiri atas 5 item pernyataan kepada 30 orang responden (Lampiran 3) dan tabel 4.9, maka besarnya tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator akuntabilitas (*accountability*) pada BSM Cabang Palembang dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{665}{30 \times 5 \times 5} \times 100\% = \frac{665}{750} \times 100\% = 88,67\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator akuntabilitas (*accountability*) pada BSM Cab Palembang adalah sebesar 88,67%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

3. Deskriptif Implementasi Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Responsibility adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya.

Dari data kuisioner yang terdiri dari 30 orang responden, dengan indikator pertanggungjawaban dan 2 item pernyataan serta diolah oleh SPSS maka dapat dilihat hasil pada tabel 4.10 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi
Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) pada BSM Cabang Palembang

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total	Persentase Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1.	Organ bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan bank.	21	9	0	0	0	30	70,0	30,0	0	0	0
2.	Bank melaksanakan tanggung jawab sosial, peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan.	15	15	0	0	0	30	50,0	50,0	0	0	0
Total		36	24	0	0	0		120	80	0	0	0
		180	96	0	0	0		600	320	0	0	0
		276						920				

Berdasarkan hasil tabel 4.10 di atas untuk item pernyataan 1 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 21 orang responden dengan persentase 70,0%. Sementara tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 9 orang responden dengan persentase 30,0% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS) tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 2 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 15 orang responden dengan persentase 50,0%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 15 orang responden dengan persentase 50,0%, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Berdasarkan data kuisioner mengenai prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yang terdiri atas 2 item pernyataan kepada 30 orang responden (Lampiran 3) dan tabel 4.10, maka besarnya tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator pertanggungjawaban (*responsibility*) pada BSM Cabang Palembang dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{276}{30 \times 5 \times 2} \times 100\% = \frac{276}{300} \times 100\% = 92\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator pertanggungjawaban (*responsibility*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 92%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

4. Deskriptif Implementasi Prinsip Independensi (*independency*)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku. Dari data kuisioner yang terdiri dari 30 orang responden, dengan indikator independensi dan 2 item pernyataan serta diolah oleh SPSS maka dapat dilihat hasil pada tabel 4.11 sebagai berikut :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi
Prinsip Independensi (*independency*) pada BSM Cabang Palembang

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total	Persentase Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1.	Masing-masing organ bank menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.	17	13	0	0	0	30	56,7	43,7	0	0	0
2.	Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.	11	19	0	0	0	30	36,7	63,3	0	0	0
Total		28	32	0	0	0		93,4	106,6	0	0	0
		140	128	0	0	0		467	426,4	0	0	0
		268						893,4				

Berdasarkan hasil tabel 4.11 di atas untuk item pernyataan 1 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 17 orang responden dengan persentase 56,7%. Sementara tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 13 orang responden dengan persentase 43,3% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS) tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 2 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 11 orang responden dengan persentase 36,7%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 19 orang responden dengan persentase 63,3%, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Berdasarkan data kuisioner mengenai prinsip independensi (*independency*) yang terdiri atas 2 item pernyataan kepada 30 orang responden (Lampiran 3) dan tabel 4.11, maka besarnya tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator independensi (*independency*) pada BSM Cabang Palembang dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{268}{30 \times 5 \times 2} \times 100\% = \frac{268}{300} \times 100\% = 89,33\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator independensi (*independency*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 89,33%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

5. Deskriptif Implementasi Prinsip Kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat

memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Dari data kuisioner yang terdiri dari 30 orang responden, dengan indikator kewajaran dan 3 item pernyataan serta diolah oleh SPSS maka dapat dilihat hasil pada tabel 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rekapitulasi Jawaban Responden atas Implementasi
Prinsip Kewajaran (*fairness*) pada BSM Cabang Palembang

No.	Pernyataan	Jawaban Responden					Total	Persentase Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS		SS	S	KS	TS	STS
1.	Bank memberi kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.	16	14	0	0	0	30	53,3	46,7	0	0	0
2.	Bank memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada <i>stakeholders</i> sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan..	10	20	0	0	0	30	33,3	66,7	0	0	0
3.	Bank memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan lainnya.	15	15	0	0	0	30	50,0	50,0	0	0	0
Total		41	49	0	0	0		136,6	163,4	0	0	0
		205	196	0	0	0		683	653,6	0	0	0
		401						1336,6				

Berdasarkan hasil tabel 4.12 di atas untuk item pernyataan 1 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 16 orang responden dengan persentase 53,3%. Sementara tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 14 orang responden dengan persentase 46,7% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS) tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 2 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 10 orang responden dengan persentase 33,3%. Tanggapan responden yang yang menjawab setuju (S) adalah 20 orang responden dengan persentase 66,7%, dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Item pernyataan 3 jumlah frekuensi tanggapan responden yang menjawab sangat setuju (SS) adalah 15 orang responden dengan persentase 50,0%. Tanggapan responden yang menjawab setuju (S) adalah 15 orang responden dengan persentase 50% dan tidak ada yang menjawab kurang setuju (KS), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

Berdasarkan data kuisioner mengenai prinsip kewajaran (*fairness*) yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 30 orang responden (Lampiran 3) dan tabel 4.12, maka besarnya tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator kewajaran (*fairness*) pada BSM Cab Palembang dapat dihitung sebagai berikut

$$P = \frac{401}{30 \times 5 \times 3} \times 100\% = \frac{401}{450} \times 100\% = 89,11\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam indikator kewajaran (*fairness*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 89,11%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada responden, maka diperoleh pernyataan responden mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sehingga dapat dijawab permasalahan yang diajukan mengenai bagaimanakah penerapan *Good Corporate Governance* pada BSM Cabang Palembang.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan seperti yang termuat dalam Lampiran 3, maka tingkat penerapan prinsip GCG pada BSM Cab Palembang dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{2149}{30 \times 5 \times 16} \times 100\% = \frac{2149}{2400} \times 100\% = 89,54\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dapat dikategorikan sangat baik, karena berada pada skala interval 81%-100%.

F. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*). Tingkat penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 89,33%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81%-100%. Hal ini sesuai dengan pengertian keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*). Tingkat penerapan prinsip akuntabilitas (*accountability*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 88,67%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81%-100%. Hal ini sesuai dengan pengertian akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan, fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency* dan

fairness). Tingkat penerapan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 92%. Tingkat persentase ini menurut aturan likert dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81%-100%. Hal ini sesuai dengan pengertian pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya ; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*). Tingkat penerapan prinsip independensi (*independency*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 89,33%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81%-100%. Hal ini sesuai dengan pengertian independensi (*independency*) yaitu perusahaan dikelola secara profesional dan independen tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*). Tingkat penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) pada BSM Cabang Palembang adalah sebesar 89,11%. Tingkat persentase ini menurut aturan

Likert dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81%-100%. Hal ini sesuai dengan pengertian kewajaran (*fairness*) yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan penerapan prinsip *good corporate governance* yaitu “TARIF” (*transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang telah diterapkan dengan sangat baik. Tingkat penerapan dari keseluruhan prinsip adalah sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81%-100%. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Abdul Syair (2009) yang berjudul implementasi *good corporate governance* pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara memiliki tingkat penerapan implementasi GCG sangat baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri dengan melakukan kuisioner ke staf bank syariah mandiri maka dapat disimpulkan hasil perhitungan dari keseluruhan penerapan masing – masing prinsip *Good Corporate Governance* yang telah dihitung dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip GCG pada BSM Cabang Palembang sebesar 89,54%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dapat dikategorikan sangat baik, karena berada pada skala interval 81%-100%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang secara keseluruhan telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sangat baik.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada segenap jajaran Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang agar tetap mengimplementasikan GCG dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya terus mengadakan evaluasi terhadap implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan sehingga di masa-masa yang akan datang GCG dapat menjadi budaya perusahaan.
2. Selain itu juga sebaiknya budaya kerja yang Islami lebih ditekankan dalam setiap kegiatan perusahaan, apalagi untuk sebuah bank syariah budaya kerja Islami adalah wajib hukumnya. Diharapkan dengan itu semua pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bisa lebih maksimal ditambah lagi bahwa dalam ajaran Islam terkandung tentang prinsip-prinsip GCG jadi sebaiknya bank syariah menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan GCG.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan prinsip GCG dilihat dari kelengkapan dan kesesuaian struktur pelaksanaan GCG dengan peraturan-peraturan yang ada dengan menggunakan pengumpulan data secara wawancara, sehingga dapat diperoleh mengenai gambaran sesungguhnya dari penerapan GCG.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib Dan M. Umer Chapra. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bank Indonesia. 2006. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Unit Usaha Syariah*. (online), (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 07.30).
- Bank Indonesia. 2009. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. (online), (www.bi.go.id, diakses pada tanggal 14 September 2016 pukul 07.30).
- Darmawan, Rian Ikmal. 2013. "Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya
- Fahmi Irham, 2013. *Etika Bisnis ; Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung : Alfabeta
- Fajarwati, Diana. 2011. "Analisis Penerapan Prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* Di Lingkungan Internal Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Jakarta". *Skripsi*. Depok: Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. (tidak diterbitkan)
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metode Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hendry. *Populasi Dan Sampel*. Diakses dari <https://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/populasi-dan-sampel.html>. diakses 16 September 2016, pukul 9.45 WIB.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : K E N C A N A Prenadamedia Group, Edisi Pertama
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negera Nomor 117/M-Mbu/2002 Tentang Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada BUMN, pasal 4

Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. (online), (<http://www.governance-indonesia.com/component/option.com>), diakses pada tanggal 20 september 2016).

Komite Nasional Kebijakan *Governance*. 2006. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. (online), (<http://www.governance-indonesia.com/component/option.com>), diakses pada tanggal 20 september 2016).

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* 2015

Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN

Organization for economic corporation and development (OECD). 1999. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance*

Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, 2004

Pedoman Good Corporate Governance Indonesia Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006

Prasetyo, Andi. 2013. "Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Internasional indonesia tbk (Studi Kasus: Bank Bii Cabang Utama Surabaya)" *Jurnal Akuntansi Unesa*. Vol. 1 Nomer. 3. Universitas Negeri Surabaya

Rakim. "Desain Penelitian". diakses dari <http://rakim-ypk.blogspot.in/2008/06/desain-penelitian.html> pada tanggal 26 Agustus 2016 pukul 09.10

Riandri, Yusri Putri. 2012. "Implementasi *Good Corporate Governance* Untuk Mengelola Risiko Perbankan (PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Makasar)".

Ristifani. 2009. "Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

- Samiun, Ali. 2016. *Pengertian Observas dan Jenis Observasi*, <http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html>, diakses 16 September 2016, Pukul 9.30 WIB.
- Sarwono, Jonathan. 2008. *Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Siregar, Sofian. 2014. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syukron, Ali. 2013. “*Good Corporate Governance Di Bank Syari’ah*”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1. STAI Darul Ulum Banyuwangi.
- Trihantana, Rully. 2015. “*Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/Pbi/2009*”. *Jurnal Online Perbankan Syariah*. Volume 1, No 2. <http://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/670> . 10 November 2016
- www.syariahmandiri.co.id

Lampiran 1 Kuisioner

Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang

Responden yang terhormat,

Dalam segala kesibukan Bapak/Ibu pada saat ini, perkenankanlah saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuisioner ini. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan jujur dan terbuka sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuisioner ini adalah bantuan yang begitu berharga bagi saya. Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

I. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk melengkapi daftar isian yang tertera di bawahini:

- Nama :
- Jenis Kelamin (P/L) :
- Umur :
- Jabatan :
- Masa Kerja dalam Jabatan Sekarang :
- Masa Kerja di BSM Cabang Palembang :
- Latar Belakang Pendidikan :

II. Petunjuk pengisian kuisioner

Berilah tanda checklist ($\checkmark$) pada kolom jawaban yang menurut Bapak/Ibu sesuai atau paling tepat sebagai berikut:

- SS** : Sangat Setuju
- S** : Setuju
- KS** : Kurang Setuju
- TS** : Tidak Setuju
- STS** : Sangat Tidak Setuju

A. Keterbukaan (*transparency*)

No.	Uraian Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Bank menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dipertimbangkan serta mudah diakses oleh <i>stakeholders</i> sesuai dengan haknya.					
2.	Informasi yang diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank, kondisi keuangan, kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, manajemen risiko, pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.					
3.	Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.					
4.	Kebijakan bank harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>).					

B. Akuntabilitas (*Accountability*)

No.	Uraian Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Bank menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ bank dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai bank, dan strategi bank.					
2.	Bank meyakini bahwa semua organ dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.					
3.	Bank memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan bank.					
4.	Bank memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran bank yang konsisten dengan sasaran usaha bank, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.					
5.	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ bank dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.					

C. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

No.	Uraian Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Organ bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan bank.					
2.	Bank melaksanakan tanggung jawab sosial, peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan.					

D. Independensi (*Independency*)

No.	Uraian Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Masing-masing organ bank menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.					
2.	Masing-masing organ bank harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.					

E. Kewajaran (*Fairness*)

No.	Uraian Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Bank memberi kesempatan kepada <i>stakeholders</i> untuk memberikan masukan, menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.					
2.	Bank memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada <i>stakeholders</i> sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.					
3.	Bank memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan lainnya.					

Lampiran 2 Tabulasi Hasil Data Kuesioner

No. Responden	Keterbukaan (Transparency)				Total Skor	Akuntabilitas (Accountability)					Total Skor	Pertanggungjawaban (Responsibility)		Total Skor	Independensi (Independency)		Total Skor	Kewajaran (Fairness)			Total Skor
	1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11		12	13		14	15	16	
1	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12
2	5	4	4	5	18	5	4	5	4	5	23	5	4	9	5	4	9	5	4	5	14
3	5	4	5	4	18	5	4	5	4	5	23	5	5	10	5	5	10	5	5	5	15
4	5	4	5	5	19	5	5	4	4	4	22	5	5	10	4	4	8	5	5	5	15
5	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	5	4	9	4	4	8	4	4	4	12
6	5	4	5	4	18	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12
7	4	4	5	4	17	4	5	4	4	5	22	5	5	10	4	5	9	5	5	5	15
8	4	4	4	5	17	4	4	4	4	4	20	5	4	9	5	4	9	5	5	4	14
9	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	25	4	5	9	5	4	9	5	5	4	14
10	5	4	5	5	19	5	4	5	4	5	23	5	5	10	5	5	10	4	4	4	12
11	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	25	5	5	10	5	5	10	5	5	5	15
12	4	5	4	5	18	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12
13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	5	9	4	4	4	12
14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12
15	5	5	4	5	19	5	4	5	4	5	23	5	5	10	5	4	9	4	4	4	12
16	4	4	4	5	17	4	5	4	5	4	22	5	4	9	5	4	9	5	4	5	14
17	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	5	5	10	5	5	10	5	5	5	15
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12
19	5	4	5	5	19	5	5	5	5	5	25	5	5	10	5	5	10	5	5	5	15
20	5	5	5	4	19	4	4	4	4	4	20	5	4	9	5	4	9	4	4	5	13
21	5	4	5	5	19	4	4	4	4	4	20	5	5	10	5	4	9	5	4	5	14
22	5	5	5	5	20	5	4	5	4	5	23	4	5	9	5	4	9	4	4	4	12
23	5	4	5	4	18	5	4	5	4	5	23	5	5	10	4	4	8	5	5	5	15
24	4	4	4	5	17	4	4	4	5	4	21	5	5	10	4	5	9	5	4	5	14
25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	5	4	9	5	5	10	5	4	5	14
26	4	5	4	5	18	5	4	5	4	5	23	5	4	9	5	4	9	5	4	5	14
27	4	4	4	4	16	4	5	4	5	4	22	5	5	10	5	5	10	5	5	5	15
28	4	4	4	5	17	4	4	4	4	4	20	4	4	8	4	4	8	4	4	4	12
29	4	5	4	5	18	5	5	4	4	4	22	5	4	9	5	5	10	4	4	4	12
30	4	5	4	5	18	5	4	5	4	5	23	5	5	10	4	4	8	4	4	4	12
jumlah	136	130	135	138	539	136	131	134	129	135	665	141	135	276	137	131	268	136	130	135	401

Perhitungan Indikator Kuesioner

No. Responden	Keterbukaan (<i>transparency</i>)													
	Y	Y ²	1			2			3			4		
			X	X ²	XY	X	X ²	XY	X	X ²	XY	X	X ²	XY
1	16	256	4	16	64	4	16	64	4	16	64	4	16	64
2	18	324	5	25	90	4	16	72	4	16	72	5	25	90
3	18	324	5	25	90	4	16	72	5	25	90	4	16	72
4	19	361	5	25	95	4	16	76	5	25	95	5	25	95
5	20	400	5	25	100	5	25	100	5	25	100	5	25	100
6	18	324	5	25	90	4	16	72	5	25	90	4	16	72
7	17	289	4	16	68	4	16	68	5	25	85	4	16	68
8	17	289	4	16	68	4	16	68	4	16	68	5	25	85
9	18	324	5	25	90	4	16	72	5	25	90	4	16	72
10	19	361	5	25	95	4	16	76	5	25	95	5	25	95
11	18	324	5	25	90	4	16	72	5	25	90	4	16	72
12	18	324	4	16	72	5	25	90	4	16	72	5	25	90
13	16	256	4	16	64	4	16	64	4	16	64	4	16	64
14	16	256	4	16	64	4	16	64	4	16	64	4	16	64
15	19	361	5	25	95	5	25	95	4	16	76	5	25	95
16	17	289	4	16	68	4	16	68	4	16	68	5	25	85
17	20	400	5	25	100	5	25	100	5	25	100	5	25	100
18	16	256	4	16	64	4	16	64	4	16	64	4	16	64
19	19	361	5	25	95	4	16	76	5	25	95	5	25	95
20	19	361	5	25	95	5	25	95	5	25	95	4	16	76
21	19	361	5	25	95	4	16	76	5	25	95	5	25	95
22	20	400	5	25	100	5	25	100	5	25	100	5	25	100
23	18	324	5	25	90	4	16	72	5	25	90	4	16	72
24	17	289	4	16	68	4	16	68	4	16	68	5	25	85
25	20	400	5	25	100	5	25	100	5	25	100	5	25	100
26	18	324	4	16	72	5	25	90	4	16	72	5	25	90
27	16	256	4	16	64	4	16	64	4	16	64	4	16	64
28	17	289	4	16	68	4	16	68	4	16	68	5	25	85
29	18	324	4	16	72	5	25	90	4	16	72	5	25	90
30	18	324	4	16	72	5	25	90	4	16	72	5	25	90
Jumlah	539	9731	136	624	2458	130	570	2346	135	615	2438	138	642	2489

No. Responden	Akuntabilitas (<i>accountability</i>)																
	Y	Y ²	1			2			3			4			5		
			X	X ²	XY	X	X ²	XY	X	X ²	XY	X	X ²	XY	X	X ²	XY
1	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
2	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
3	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
4	22	484	5	25	110	5	25	110	4	16	88	4	16	88	4	16	88
5	25	625	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125
6	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
7	22	484	4	16	88	5	25	110	4	16	88	4	16	88	5	25	110
8	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
9	25	625	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125
10	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
11	25	625	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125
12	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
13	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
14	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
15	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
16	22	484	4	16	88	5	25	110	4	16	88	5	25	110	4	16	88
17	25	625	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125
18	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
19	25	625	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125
20	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
21	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
22	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
23	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
24	21	441	4	16	84	4	16	84	4	16	84	5	25	105	4	16	84
25	25	625	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125	5	25	125
26	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
27	22	484	4	16	88	5	25	110	4	16	88	5	25	110	4	16	88
28	20	400	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80	4	16	80
29	22	484	5	25	110	5	25	110	4	16	88	4	16	88	4	16	88
30	23	529	5	25	115	4	16	92	5	25	115	4	16	92	5	25	115
Jumlah	665	14843	136	624	3038	131	579	2920	134	606	2994	129	561	2875	135	615	3016

No. Responden	Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)							
	Y	Y ²	1			2		
			X	X ²	XY	X	X ²	XY
1	8	64	4	16	32	4	16	32
2	9	81	5	25	45	4	16	36
3	10	100	5	25	50	5	25	50
4	10	100	5	25	50	5	25	50
5	9	81	5	25	45	4	16	36
6	8	64	4	16	32	4	16	32
7	10	100	5	25	50	5	25	50
8	9	81	5	25	45	4	16	36
9	9	81	4	16	36	5	25	45
10	10	100	5	25	50	5	25	50
11	10	100	5	25	50	5	25	50
12	8	64	4	16	32	4	16	32
13	8	64	4	16	32	4	16	32
14	8	64	4	16	32	4	16	32
15	10	100	5	25	50	5	25	50
16	9	81	5	25	45	4	16	36
17	10	100	5	25	50	5	25	50
18	8	64	4	16	32	4	16	32
19	10	100	5	25	50	5	25	50
20	9	81	5	25	45	4	16	36
21	10	100	5	25	50	5	25	50
22	9	81	4	16	36	5	25	45
23	10	100	5	25	50	5	25	50
24	10	100	5	25	50	5	25	50
25	9	81	5	25	45	4	16	36
26	9	81	5	25	45	4	16	36
27	10	100	5	25	50	5	25	50
28	8	64	4	16	32	4	16	32
29	9	81	5	25	45	4	16	36
30	10	100	5	25	50	5	25	50
Jumlah	276	2558	141	669	1306	135	615	1252

No. Responden	Independensi (<i>independency</i>)							
	Y	Y ²	1			2		
			X	X ²	XY	X	X ²	XY
1	8	64	4	16	32	4	16	32
2	9	81	5	25	45	4	16	36
3	10	100	5	25	50	5	25	50
4	8	64	4	16	32	4	16	32
5	8	64	4	16	32	4	16	32
6	8	64	4	16	32	4	16	32
7	9	81	4	16	36	5	25	45
8	9	81	5	25	45	4	16	36
9	9	81	5	25	45	4	16	36
10	10	100	5	25	50	5	25	50
11	10	100	5	25	50	5	25	50
12	8	64	4	16	32	4	16	32
13	9	81	4	16	36	5	25	45
14	8	64	4	16	32	4	16	32
15	9	81	5	25	45	4	16	36
16	9	81	5	25	45	4	16	36
17	10	100	5	25	50	5	25	50
18	8	64	4	16	32	4	16	32
19	10	100	5	25	50	5	25	50
20	9	81	5	25	45	4	16	36
21	9	81	5	25	45	4	16	36
22	9	81	5	25	45	4	16	36
23	8	64	4	16	32	4	16	32
24	9	81	4	16	36	5	25	45
25	10	100	5	25	50	5	25	50
26	9	81	5	25	45	4	16	36
27	10	100	5	25	50	5	25	50
28	8	64	4	16	32	4	16	32
29	10	100	5	25	50	5	25	50
30	8	64	4	16	32	4	16	32
Jumlah	268	2412	137	633	1233	131	579	1179

No. Responden	Kewajaran (<i>fairness</i>)										
	Y	Y ²	1			2			3		
			X	X ²	XY	X	X ²	XY	X	X ²	XY
1	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
2	14	196	5	25	70	4	16	56	5	25	70
3	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
4	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
5	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
6	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
7	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
8	14	196	5	25	70	5	25	70	4	16	56
9	14	196	5	25	70	5	25	70	4	16	56
10	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
11	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
12	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
13	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
14	12	G	4	16	48	4	16	48	4	16	48
15	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
16	14	196	5	25	70	4	16	56	5	25	70
17	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
18	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
19	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
20	13	169	4	16	52	4	16	52	5	25	65
21	14	196	5	25	70	4	16	56	5	25	70
22	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
23	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
24	14	196	5	25	70	4	16	56	5	25	70
25	14	196	5	25	70	4	16	56	5	25	70
26	14	196	5	25	70	4	16	56	5	25	70
27	15	225	5	25	75	5	25	75	5	25	75
28	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
29	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
30	12	144	4	16	48	4	16	48	4	16	48
Jumlah	401	5265	136	624	1836	130	570	1752	135	615	1821

Lampiran 4 . Perhitungan Uji Validitas

Keterbukaan Item 1

$$\begin{aligned}
 r_{hitung} &= \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}} & t_{hitung} &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 &= \frac{30(2458) - (136)(539)}{\sqrt{\{30 \cdot 624 - (136)^2\}\{30 \cdot 9731 - (539)^2\}}} & &= \frac{0,776\sqrt{30-2}}{\sqrt{1-(0,776)^2}} \\
 &= \frac{73740 - 73304}{\sqrt{\{18720 - 18496\}\{291930 - 290521\}}} & &= \frac{0,776\sqrt{28}}{\sqrt{1-0,602}} \\
 &= \frac{436}{\sqrt{224(1409)}} & &= \frac{0,776(5,291)}{\sqrt{0,398}} \\
 &= \frac{436}{\sqrt{315616}} & &= \frac{4,106}{0,631} \\
 &= \frac{436}{561,797} & &= 6,507 \\
 &= 0,776
 \end{aligned}$$

Lampiran 4.

Hasil Uji Validitas Keterbukaan (*transparency*)

Correlations

		T1	T2	T3	T4	JT
T1	Pearson Correlation	1	.094	.802**	.055	.776**
	Sig. (2-tailed)		.619	.000	.775	.000
	N	30	30	30	30	30
T2	Pearson Correlation	.094	1	.000	.433*	.584**
	Sig. (2-tailed)	.619		1.000	.017	.001
	N	30	30	30	30	30
T3	Pearson Correlation	.802**	.000	1	-.136	.666**
	Sig. (2-tailed)	.000	1.000		.473	.000
	N	30	30	30	30	30
T4	Pearson Correlation	.055	.433*	-.136	1	.522**
	Sig. (2-tailed)	.775	.017	.473		.003
	N	30	30	30	30	30
JT	Pearson Correlation	.776**	.584**	.666**	.522**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.003	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (*accountability*)

Correlations

		A1	A2	A3	A4	A5	JA
A1	Pearson Correlation	1	.296	.875**	.175	.802**	.845**
	Sig. (2-tailed)		.113	.000	.355	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
A2	Pearson Correlation	.296	1	.120	.709**	.208	.606**
	Sig. (2-tailed)	.113		.527	.000	.271	.000
	N	30	30	30	30	30	30
A3	Pearson Correlation	.875**	.120	1	.262	.935**	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.527		.161	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
A4	Pearson Correlation	.175	.709**	.262	1	.218	.611**
	Sig. (2-tailed)	.355	.000	.161		.247	.000
	N	30	30	30	30	30	30
A5	Pearson Correlation	.802**	.208	.935**	.218	1	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.271	.000	.247		.000
	N	30	30	30	30	30	30
JA	Pearson Correlation	.845**	.606**	.857**	.611**	.849**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

Hasil Uji Validitas Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Correlations

		R1	R2	JR
R1	Pearson Correlation	1	.364*	.809**
	Sig. (2-tailed)		.048	.000
	N	30	30	30
R2	Pearson Correlation	.364*	1	.842**
	Sig. (2-tailed)	.048		.000
	N	30	30	30
JR	Pearson Correlation	.809**	.842**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

Hasil Uji Validitas Independensi (*independency*)

Correlations

		I1	I2	JI
I1	Pearson Correlation	1	.247	.796**
	Sig. (2-tailed)		.189	.000
	N	30	30	30
I2	Pearson Correlation	.247	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.189		.000
	N	30	30	30
JI	Pearson Correlation	.796**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Validitas Kewajaran (*fairness*)

Correlations

		F1	F2	F3	JF
F1	Pearson Correlation	1	.661**	.802**	.948**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	30	30	30	30
F2	Pearson Correlation	.661**	1	.424*	.793**
	Sig. (2-tailed)	.000		.019	.000
	N	30	30	30	30
F3	Pearson Correlation	.802**	.424*	1	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000	.019		.000
	N	30	30	30	30
JF	Pearson Correlation	.948**	.793**	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

**Hasil Uji Validitas Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*
Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Palembang**

Indikator Variabel	No Item Pernyataan	Koefisien Korelasi r_{hitung}	Harga t_{hitung}	Harga r_{tabel}	Harga t_{tabel}	Keputusan
Keterbukaan (<i>transparency</i>)	1	0,776	6,508	0,361	1,701	Valid
	2	0,584	3,808	0,361	1,701	Valid
	3	0,666	4,722	0,361	1,701	Valid
	4	0,522	2,776	0,361	1,701	Valid
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	1	0,845	8,355	0,361	1,701	Valid
	2	0,606	4,027	0,361	1,701	Valid
	3	0,857	8,804	0,361	1,701	Valid
	4	0,611	4,081	0,361	1,701	Valid
	5	0,849	8,507	0,361	1,701	Valid
Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	1	0,809	7,279	0,361	1,701	Valid
	2	0,842	8,265	0,361	1,701	Valid
Independensi (<i>independency</i>)	1	0,796	6,962	0,361	1,701	Valid
	2	0,783	6,661	0,361	1,701	Valid
kewajaran (<i>fairness</i>)	1	0,948	15,773	0,361	1,701	Valid
	2	0,793	6,890	0,361	1,701	Valid
	3	0,861	8,949	0,361	1,701	Valid

Uji Reliabelitas

Keterbukaan (*transparency*)

Langkah 1 : Menghitung varians skor tiap-tiap item

$$S_i = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

$$S_1 = \frac{624 - \frac{(136)^2}{30}}{30} = \frac{624 - \frac{18496}{30}}{30} = \frac{624 - 616,533}{30} = \frac{7,467}{30} = 0,25$$

$$S_2 = \frac{570 - \frac{(130)^2}{30}}{30} = \frac{570 - \frac{16900}{30}}{30} = \frac{570 - 563,333}{30} = \frac{6,667}{30} = 0,22$$

$$S_3 = \frac{615 - \frac{(135)^2}{30}}{30} = \frac{615 - \frac{18225}{30}}{30} = \frac{615 - 607,5}{30} = \frac{7,5}{30} = 0,25$$

$$S_4 = \frac{642 - \frac{(138)^2}{30}}{30} = \frac{642 - \frac{19044}{30}}{30} = \frac{642 - 634,8}{30} = \frac{7,2}{30} = 0,25$$

Langkah 2 : Menjumlahkan varians semua item

$$\begin{aligned}\Sigma S_i &= S_1 + S_1 + S_1 + S_1 \dots S_n \\ &= 0,25 + 0,22 + 0,25 + 0,25 \\ &= 0,96\end{aligned}$$

Langkah 3 : Menghitung varians total

$$\begin{aligned}S_t &= \frac{\Sigma X_t^2 - \frac{(\Sigma X_t)^2}{n}}{n} \\ &= \frac{9731 - \frac{(539)^2}{30}}{30} = \frac{9731 - \frac{290521}{30}}{30} = \frac{9731 - 9684,033}{30} = \frac{46,967}{30} = 1,566\end{aligned}$$

Langkah 4 : Memasukkan nilai alpha dengan rumus

$$\begin{aligned}r_{11} &= \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\Sigma S_i}{\Sigma S_t} \right) = \left(\frac{4}{4-1} \right) \left(1 - \frac{0,96}{1,566} \right) = 1,33 (1 - 0,613) \\ &= 1,33 (0,387) \\ &= 0,5158\end{aligned}$$

Hasil Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

Statistik Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.866	16

Sumber : Pengelolaan data oleh SPSS tahun 2016

Statistik Total Item Pernyataan

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
T1	67.10	18.231	.563	.855
T2	67.30	20.286	.096	.875
T3	67.13	18.326	.539	.856
T4	67.03	19.964	.161	.873
A1	67.10	17.748	.684	.849
A2	67.27	18.547	.508	.858
A3	67.17	17.868	.654	.851
A4	67.33	18.782	.478	.859
A5	67.13	17.775	.675	.849
R1	66.93	18.202	.631	.852
R2	67.13	18.326	.539	.856
I1	67.07	18.409	.524	.857
I2	67.27	19.099	.371	.864
F1	67.10	18.231	.563	.855
F2	67.30	18.769	.465	.860
F3	67.13	18.395	.522	.857

Hasil Uji Realibilitas Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab Palembang

Indikator Kuisioner	Koefisien Korelasi (r)		Keputusan
	Hitung	Tabel	
Keterbukaan (<i>transparency</i>)	0,516	0,374	Reliabel
Akuntabilitas (<i>accountability</i>)	0,814	0,374	Reliabel
Pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>)	0,530	0,374	Reliabel
Independensi (<i>independency</i>)	0,387	0,374	Reliabel
Kewajaran (<i>fairness</i>)	0,837	0,374	Reliabel